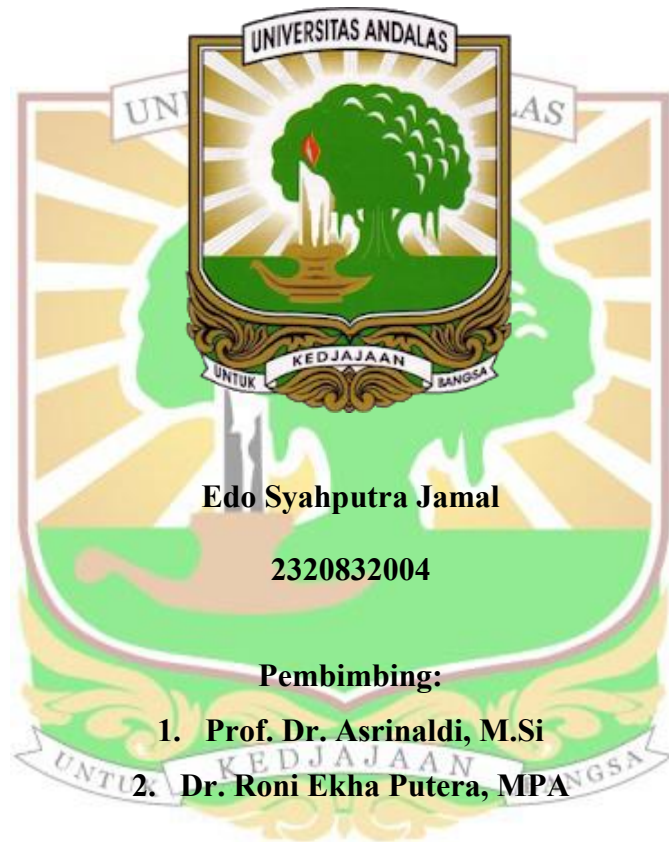


**DINAMIKA INTERAKSI AKTOR PADA JARINGAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS STUNTING DI
KABUPATEN AGAM**

TESIS



Edo Syahputra Jamal

2320832004

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si**
- 2. Dr. Roni Ekha Putera, MPA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Stunting masih menjadi isu krusial nasional di Indonesia karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi kebijakan, termasuk Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Agam tetap tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika interaksi antaraktor dalam jaringan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Agam, dengan fokus pada bagaimana relasi kekuasaan dan fragmentasi kepentingan memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan kerangka teori jaringan kebijakan dari Frans van Waarden, yang mencakup tujuh dimensi: aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan interaksi, relasi kekuasaan, dan strategi aktor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, observasi partisipatif pada forum koordinasi, serta telaah dokumen kebijakan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan kebijakan di Agam masih berjalan secara sektoral dengan fragmentasi peran antar organisasi perangkat daerah, serta distribusi kekuasaan yang bersifat top-down. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memiliki posisi dominan, sementara pelaksana lapangan seperti bidan desa dan wali nagari memiliki ruang terbatas untuk berperan strategis. Program lintas sektor pun sering kali tumpang tindih dan tidak terintegrasi secara sistemik. Dinamika politik lokal, akses informasi yang tidak merata, dan lemahnya kelembagaan kolaborasi memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori jaringan kebijakan dalam konteks kesehatan publik dan pemerintahan desentralistik. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan TPPS, harmonisasi peran aktor, dan kolaborasi lintas sektor yang inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada sorotan terhadap disintegrasi interaksi aktor dalam jaringan kebijakan, yang masih jarang dikaji dalam studi penurunan stunting.

Kata Kunci: Jaringan Kebijakan, Stunting, Interaksi Aktor, Kebijakan Multisektor, Kabupaten Agam.



ABSTRACT

Stunting remains a critical national issue in Indonesia, threatening the long-term quality of human capital. Despite numerous national and local policy interventions, including Presidential Regulation No. 72 of 2021, the prevalence of stunting in Agam District remains high. This study aims to explore the dynamics of actor interaction within the stunting reduction policy network in Agam, focusing on how power relations and interest fragmentation influence policy implementation. Using a qualitative case study approach, this research applies Frans van Waarden's policy network theory, particularly his seven dimensions: actors, functions, structure, institutionalization, rules of interaction, power relations, and actor strategies. Data were gathered through in-depth interviews with key stakeholders, participatory observation of coordination forums, and analysis of local policy documents. Findings reveal that the policy network in Agam is characterized by sectoral silos, fragmented roles among government agencies, and a top-down distribution of authority. The Secretary of the District, acting as the head of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), holds a dominant position, while local implementers such as village midwives and nagari leaders have limited influence. Furthermore, overlapping programs and poor integration of data across sectors hinder effective implementation. Political dynamics and unequal access to resources exacerbate the fragmentation. The study also identifies weak institutional mechanisms and underutilization of non-governmental actors. This research contributes to policy network theory by applying it to the public health context in a decentralized governance setting. Practically, it recommends strengthening institutional capacity, enhancing role harmonization, and promoting inclusive, multi-sector collaboration. The novelty of this study lies in its focus on actor-level disintegration within policy networks—an issue rarely addressed in existing literature on stunting intervention.

Keywords: Policy Network, Stunting, Actor Interaction, Multisector Policy, Agam Regency.

